

ABSTRAKSI

Kedaulatan negara atas wilayah udara bersifat penuh dan eksklusif yang artinya bahwa ruang udara suatu negara bersifat tertutup dan tidak dapat dilintasi oleh pesawat udara manapun tanpa memperoleh izin dari negara kolong sebelumnya. Namun pada praktiknya, hal tersebut masih sering dilanggar yang salah satunya terjadi karena ketentuan hak lintas damai yang diberikan pada penerbangan tidak berjadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Konvensi Chicago 1944. Salah satu contoh pelanggaran kedaulatan di wilayah udara oleh penerbangan tidak berjadwal asing ialah yang dialami oleh Indonesia pada Januari 2019 yang dilakukan oleh *Ethiopian Airlines* penerbangan ETH3728. Untuk itu perlu diketahui mengenai pengaturan hukum terkait penerbangan tidak berjadwal asing dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta yurisdiksi Indonesia selaku negara kolong terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh *Ethiopian Airlines* penerbangan ETH3728 tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional pengaturan terkait penerbangan tidak berjadwal diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 3 *bis* huruf b Konvensi Chicago 1944. Sementara itu dalam hukum nasional Indonesia, ketentuan terkait penerbangan tidak berjadwal ditemukan pada Pasal 93 ayat (2), Pasal 94, dan Pasal 95 UU Penerbangan, Pasal 7 ayat (1) Permenhub No. PM 66 Tahun 2015 *jo*. Pasal 7 ayat (2) Permenhub No. PM 109 Tahun 2016, dan pasal 8 Permenhub No. PM 66 tahun 2015. Berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional, *Ethiopian Airlines* penerbangan ETH3728 dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas kedaulatan wilayah udara Indonesia. Sehingga Indonesia selaku negara kolong memiliki yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara tersebut dan berhak menegakkan hukum nasional negaranya.

Kata kunci: yurisdiksi negara, pelanggaran kedaulatan, penerbangan tidak berjadwal asing

ABSTRACT

State sovereignty over airspace is complete and exclusive, which means that a state's air space is closed and any aircraft can't fly over without obtaining prior permission from the subjacent state. However, in practice, this is often violated which can be occurred due to the provisions of the right of innocent passage granted to unscheduled flights as regulated in Article 5 of the 1944 Chicago Convention. One of the violations of sovereignty in airspace by foreign unscheduled flights was that experienced by Indonesia in January 2019 by Ethiopians Airlines flight ETH3728. For this reason, it is necessary to know about the regulation related to foreign unscheduled flights in international law and Indonesian national law, as well as Indonesia's jurisdiction as the subjacent state against cases of violations committed by Ethiopian Airlines flight ETH3728. The approach method used in this legal research is normative juridical which is presented in a descriptive analytical manner. The data used in this research is secondary data which are then analyzed qualitatively. The results of the research show that in international law the regulations related to unscheduled flights are regulated in Article 5 and Article 3 bis letter b of the 1944 Chicago Convention. Meanwhile in Indonesian national law, provisions related to unscheduled flights are found in Article 93 paragraph (2), Article 94. , and Article 95 of the Aviation Law, Article 7 paragraph (1) Permenhub No. PM 66 of 2015 jo. Article 7 paragraph (2) Permenhub No. PM 109 of 2016, and article 8 of Permenhub No. PM 66 of 2015. Based on the international law and Indonesian national law, Ethiopian Airlines flight ETH3728 was declared to have violated Indonesia's airspace sovereignty. In that case, Indonesia as the subjacent state has jurisdiction over violations committed by Ethiopian Airlines aircraft and has the right to enforce the national laws of its country.

Keyword: *state jurisdiction, violation of sovereignty, unscheduled flights*